

PT JAMKRIDA JABAR

Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - ii
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 33



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JABAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Budhi Muljawan
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 592 - Bandung
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Budi Setyono
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 592 – Bandung
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tahun buku 2019.
2. Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud butir 1 diatas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 :
 - a. Telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Patuh dan bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian intern yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 06 April 2020

PT JAMKRIDA JABAR



Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama

Budi Setyono
Direktur Keuangan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. BAMBANG SUDARYONO & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Izin Usaha : KEP-184/KM.17/1999

Nomor: 00094/2.0326/AU.1/09/0411-2/1/IV/2020

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamkrida Jabar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan



Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA., CA.

Surat Izin Akuntan Publik No: AP. 0411

6 April 2020

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	171.333.693.369	139.780.660.474
Piutang Re/Cogaransi	2e, 4	3.455.037.602	8.000.292.199
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2e, 5	1.089.865.915	659.582.342
Beban Dibayar Dimuka	2f, 6a	18.522.765.653	11.768.542.206
Aset Keuangan	2d, 7	35.091.999.415	2.000.000.000
Properti Investasi	8	2.472.000.000	2.445.000.000
Jumlah Aset Lancar		231.965.361.954	164.654.077.221
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
<i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar</i>			
<i>Rp 3.859.535.958 dan Rp 3.122.851.605 masing-</i>			
<i>masing per 31 Desember 2019 dan 2018</i>	2g, 9	11.699.143.923	12.246.524.776
Beban Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	2f, 6b	94.168.001.739	40.751.574.357
Aset Keuangan - Jangka Panjang	2d, 7	14.071.246.250	40.117.681.442
Aset Pajak Tangguhan	2m, 18d	7.270.568.929	6.856.019.590
Aset Lain-Lain	2h, 10	974.836.625	717.052.107
Jumlah Aset Tidak Lancar		128.183.797.466	100.688.852.272
JUMLAH ASET		360.149.159.420	265.342.929.494
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	2m, 18a	383.573.008	275.360.912
Utang Re/Cogaransi	11	4.572.288.614	3.289.613.327
Beban yang Masih Harus Dibayar	12	898.401.062	1.267.537.773
Penampungan Sementara	13	4.008.552.513	3.048.703.129
Utang Lancar Lainnya	14	12.894.322	65.470.402
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	15a	32.073.362.791	23.943.191.544
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		41.949.072.310	31.889.877.087
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	15b	151.295.084.398	70.909.003.822
Cadangan Klaim	2p, 16	4.050.464.351	3.192.039.354
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2l, 17	1.776.025.038	1.266.827.196
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		157.121.573.787	75.367.870.372
JUMLAH LIABILITAS		199.070.646.097	107.257.747.460
EKUITAS			
Modal	19	153.200.000.000	153.200.000.000
<i>Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham,</i>			
<i>modal ditempatkan dan disetor penuh per 31</i>			
<i>Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak</i>			
<i>15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp</i>			
<i>10.000.000 per lembar saham.</i>			
Cadangan Umum	19	4.094.651.887	3.761.254.328
Saldo Laba	19	3.907.910.588	1.333.590.235
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2d, 7	87.155.374	(66.000.000)
Kerugian imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan		(211.204.526)	(143.662.529)
JUMLAH EKUITAS		161.078.513.323	158.085.182.034
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		360.149.159.420	265.342.929.494

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2j, 2n, 20	47.732.911.078	41.301.947.325
Beban Akuisisi	2j, 2n, 20	(6.835.633.831)	(5.414.683.696)
Restitusi IJP	2j, 2n, 20	(1.773.299.834)	(1.434.279.301)
Manajemen Fee	2j, 2n, 20	3.219.841.076	744.034.313
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		42.343.818.489	35.197.018.641
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2j, 2p, 22	(22.636.374.896)	(22.490.345.113)
Pemulihan Cadangan Klaim	2j, 2p, 22	(858.424.997)	265.769.987
Beban Regaransi	2j, 2p, 22	(14.268.883.642)	(11.580.809.268)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(37.763.683.535)	(33.805.384.394)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		4.580.134.954	1.391.634.247
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan Investasi	2j, 21	14.935.391.990	13.359.578.616
Pendapatan Subrogasi	2j, 24	3.218.321.634	3.231.634.226
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2j, 25	(2.379.181.041)	(1.649.130.001)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		20.354.667.537	16.333.717.088
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2j, 23	(2.001.361.567)	(1.580.905.049)
Beban Sumber Daya Manusia	2j, 23	(11.415.120.309)	(11.074.805.430)
Beban Administrasi dan Umum	2j, 23	(3.422.310.413)	(2.846.274.500)
JUMLAH BEBAN USAHA		(16.838.792.289)	(15.501.984.979)
LABA SEBELUM PAJAK		3.515.875.248	831.732.109
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2m, 18b	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	2m, 18d	392.035.340	501.858.126
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		392.035.340	501.858.126
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		3.907.910.588	1.333.590.235
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(90.055.996)	156.247.754
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	18d	22.513.999	(39.061.939)
JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		(67.541.997)	117.185.816
LABA KOMPREHENSIF		3.840.368.591	1.450.776.051

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2017		153.200.000.000	2.734.815.926	-	(260.848.345)	4.105.753.606	159.779.721.188
Modal Disetor	19	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	19	-	1.026.438.402	-	-	(1.026.438.402)	-
Pembagian Dividen	19	-	-	-	-	(2.098.040.093)	(2.098.040.093)
Bonus dan Tantiem	19	-	-	-	-	(899.160.040)	(899.160.040)
CSR	19	-	-	-	-	(82.115.072)	(82.115.072)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	1.333.590.235	1.333.590.235
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d,7	-	-	(66.000.000)	-	-	(66.000.000)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan		-	-	-	117.185.816	-	117.185.816
Saldo per 31 Desember 2018		153.200.000.000	3.761.254.328	(66.000.000)	(143.662.529)	1.333.590.235	158.085.182.034
Modal Disetor	19	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	19	-	333.397.559	-	-	(333.397.559)	-
Pembagian Dividen	19	-	-	-	-	(681.464.610)	(681.464.610)
Bonus dan Tantiem	19	-	-	-	-	(292.056.261)	(292.056.261)
CSR	19	-	-	-	-	(26.671.805)	(26.671.805)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	3.907.910.588	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 7	-	-	153.155.374	-	-	153.155.374
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan		-	-	-	(67.541.997)	-	(67.541.997)
Saldo per 31 Desember 2019		153.200.000.000	4.094.651.887	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	161.078.513.323

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan	2n,2j,14,19	68.462.218.286	9.246.156.707
Pembayaran Klaim	2j,2o,10,21	(28.025.192.952)	(22.490.345.113)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok	11,12,13,22,23	(15.844.626.943)	(13.983.521.077)
Pembayaran Pajak Penghasilan	2m, 25	(2.819.358.853)	(2.443.154.042)
Pendapatan dari Investasi	2j,2e,5,20	14.669.680.535	13.481.562.325
Pendapatan Subrogasi	24	3.218.321.634	3.231.634.226
Pendapatan lain-lain	25	440.177.812	794.024.041
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		40.101.219.520	(12.163.642.933)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan	2d, 7	(6.892.408.849)	(2.181.717.934)
Properti Investasi	2d, 8	(27.000.000)	(2.445.000.000)
Pengadaan Aset Tetap	2g, 9	(189.303.500)	(381.590.960)
Pengadaan Aset Lain lain	2h, 10	(95.779.500)	(252.085.000)
Aset Dalam Penyelesaian	2h, 10	(343.502.100)	(133.529.500)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		(7.547.993.949)	(5.393.923.394)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kenaikan Modal Disetor	19	-	-
Pembentukan Cadangan Umum	19	2.079.122.528	986.237.850
Pembagian Dividen	19	(2.098.040.093)	(2.769.996.815)
Pembagian Bonus dan Tantiem	19	(899.160.040)	(1.187.141.492)
CSR	19	(82.115.072)	(108.414.748)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		(1.000.192.676)	(3.079.315.205)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		31.553.032.895	(20.636.881.531)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		139.780.660.474	160.417.542.006
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		171.333.693.369	139.780.660.474
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		140.067.568	187.880.446
Giro Bank		8.831.798.605	5.706.277.395
Deposito		162.361.827.196	133.886.502.633
Jumlah Kas dan Setara Kas		171.333.693.369	139.780.660.474

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang di tetapkan pada tanggal 13 September 2019
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286.

Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah.

Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 26 November 2019, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

2019:

Dewan Pengawas Syariah

: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
: Khozin Abu Faqih, Lc.

Komisaris

Komisaris Utama : Rodhiallah
Komisaris Perseroan : Syafrial Firdaus
Komisaris Independent : Dini Rosdini

Direksi

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan
Direktur Keuangan : Budi Setyono
Direktur Operasional : Asep Gunawan Sirad

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 tanggal 03 Januari 2017, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Rodhiallah dan Tuan Syafrial Firdaus sebagai Komisaris dan Tuan Asep Gunawan Sirad sebagai Direktur Operasional, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020. Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

c. Perubahan dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 seperti yang diungkapkan pada catatan ini.

Standar Akuntansi Baru

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 adalah:

Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian laporan keuangan" tentang "prakarsa pengungkapan". Amandemen PSAK No. 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan di bawah ini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perubahan dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

i. Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perusahaan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

ii. Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menerapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas perusahaan.

iii. Imbalan Kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (*non-vested*) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan (*vested*).

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No.60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 55 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar (pembelian yang lazim/regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya menjadi piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- **Piutang**

Piutang adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok piutang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- **Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo**

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- **Aset keuangan yang tersedia untuk dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam kategori lainnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya/dijual. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
- Investasi pada instrumen utang yang tidak ditujukan untuk dimiliki sampai jatuh tempo diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dan dicatat pada nilai wajar.

2. Penurunan Nilai dari Aset

Perusahaan melakukan penilaian pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Penurunan Nilai dari Aset (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurang melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari utilisasi dari jaminan deposit yang diberikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

Estimasi tahun antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan, dikreditkan pada cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

3. Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan memiliki kedua jenis liabilitas keuangan. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

3. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan Awal (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

i. **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai akun "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar *Derivatif - Neto*".

ii. **Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran dipasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar atau risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dan masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan aktif dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam menetapkan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang perusahaan yakin bahwa ketelibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset keuangan dan posisi *long* diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan posisi *short* diukur menggunakan harga permintaan. Jika perusahaan memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka perusahaan dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka bersih (*net open position*) mana yang lebih sesuai.

5. Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset yang masih dimiliki, perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbuku aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak lagi cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

6. Penyesuaian Risiko Kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo (melebihi jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo) kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

- i. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- ii. terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok awal aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
- iii. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap diakui dalam komponen ekuitas.

Sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dimana pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

8. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

9. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggung mitra regaransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra regaransi. Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang regaransi tatkala mitra regaransi mengaksep piutang dalam penyelesaian tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT JAMKRIDA JABAR dengan mitra regaransi), namun pembayaran belum dilakukan.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban regaransi dibayar di muka dialokasikan secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang terkait dengan regaransi.

Pada tahun 2018 dan sebelumnya, beban klaim dibebankan pada saat dibayarkan.

Pada tahun 2019 beban klaim yang memiliki hak tagih yang dibayar dimuka akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa tertentu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEPS-0001/DIR/JJ/VII/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2015 Tentang Manual Sistem Akuntansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

h. Aset Lain-Lain

1) Piranti Lunak /Software Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Lain-Lain (lanjutan)

1) Piranti Lunak /Software Komputer (lanjutan)

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dan 4 tahun).

2) Aset Lainnya

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

i. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*) kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dengan pola syariah dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*). Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah komite klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

Pada tahun 2018 dan sebelumnya, beban klaim dibebankan pada saat dibayarkan.

Pada tahun 2019 beban klaim yang memiliki hak tagih yang dibayar dimuka akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa tertentu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEPS-0001/DIR/JJ/VII/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2015 Tentang Manual Sistem Akuntansi

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

l. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

m. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal neraca.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

n. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) disajikan secara bruto.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

o. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

p. Cadangan Klaim

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 22 poin 1 (a) bahwa Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau (b) penjumlahan 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, mana yang lebih banyak. Pada poin 2 bahwa klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (lanjutan)

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

r. Informasi Segmen

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen", Perusahaan menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen serta sistem pelaporan internal Perusahaan, informasi segmen primer disajikan berdasarkan segmen usaha dan informasi segmen sekunder disajikan berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Kas	140.067.568	187.880.446
Giro Bank		
Bank Umum	5.320.954.926	3.117.689.320
Bank Umum Syariah	860.179.468	1.127.430.543
Bank BPR	1.311.877.239	698.166.607
Bank BPR Syariah	1.338.786.972	762.990.925
Jumlah Giro Bank	8.831.798.605	5.706.277.395
Deposito		
Bank Umum	90.771.827.196	72.221.502.633
Bank Umum Syariah	26.550.000.000	28.050.000.000
Bank BPR	13.665.000.000	9.615.000.000
Bank BPR Syariah	31.375.000.000	24.000.000.000
Jumlah Deposito	162.361.827.196	133.886.502.633
Jumlah Kas dan Setara Kas	171.333.693.369	139.780.660.474

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2019 di beberapa perbankan di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 11,04% p.a dan per 31 Desember 2018 mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 11,03% p.a.

4. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Piutang Re/Cogaransi	3.455.037.602	8.000.292.199
Jumlah Piutang Re/Cogaransi	3.455.037.602	8.000.292.199

Piutang Re/Cogaransi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)

5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Bunga Investasi	760.813.131	495.101.676
Pendapatan Management Fee	329.052.784	164.480.666
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.089.865.915	659.582.342

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaransi (management fee).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	2019	2018
IJP Re/Cogaransi	11.920.744.498	8.418.693.271
Biaya Akuisisi	4.885.094.765	3.100.649.078
Biaya Klaim Ditangguhkan	1.438.069.294	-
Piutang Lainnya	123.387.312	99.033.673
Beban Operasional Dibayar Dimuka	155.469.784	150.166.184
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	18.522.765.653	11.768.542.206

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	2019	2018
IJP Re/Cogaransi	65.310.266.580	30.323.578.030
Biaya Akuisisi	24.906.986.397	10.427.996.328
Beban Klaim Ditangguhkan	3.950.748.762	-
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	94.168.001.739	40.751.574.357

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaransi, IJK Re/Cogaransi dan Biaya Akuisisi dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya pinjaman yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal fee based income bank pelaksana dan beban Re/Cogaransi adalah 4 tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), fee based income, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit. Pada tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank menjadi biaya akuisisi.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

7. ASET KEUANGAN

Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	12/31/2019	12/31/2018
FR 59	7,00%	15-May-27	2.066.000.000	2.066.000.000
PT PP	10,20%	24-Feb-20	1.016.500.000	-
PT Multi Sarana	8,50%	25-Jun-22	2.000.000.000	-
PBS 15	8,00%	15-Jul-47	2.918.133.000	-
Waskita Karya THP II TH 2018	8,25%	23-Feb-23	3.000.000.000	-
FR 80	7,50%	15-Jun-35	2.997.000.000	-
FR 75	7,50%	15-May-38	4.995.000.000	-
FR 83	7,50%	15-Apr-40	4.918.921.386	-
FR 82	7,00%	15-Sep-30	3.968.000.000	-
PLN Th 2019 SERI B	8,50%	1-Aug-26	2.000.000.000	-
PLN Th 2019 SERI C	8,70%	1-Aug-29	2.000.000.000	-
PBS 022	8,60%	15-Apr-34	2.126.000.000	-
Harga Perolehan			34.005.554.386	2.066.000.000
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			87.155.374	(66.000.000)
Jumlah Obligasi Tersedia Untuk Dijual			34.092.709.760	2.000.000.000

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

7. ASET KEUANGAN (Lanjutan)

Surat Berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

<u>Surat Berharga</u>	<u>Kupon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>12/31/2019</u>	<u>12/31/2018</u>
Waskita Karya THP I TH 2017	8,50%	6-Oct-22	5.000.000.000	5.000.000.000
Hutama Karya	8,07%	6-Jun-27	6.000.000.000	6.000.000.000
KAI Th 2017 SERI A	7,75%	21-Dec-22	1.000.000.000	1.000.000.000
KAI Th 2017 SERI B	8,25%	21-Nov-24	2.000.000.000	2.000.000.000
PBS013	6,25%	13-May-19	-	6.000.000.000
FR0059	8,70%	15-May-27	-	5.000.000.000
FR0061	8,50%	15-May-22	-	6.000.000.000
PBS014	8,25%	15-May-21	-	9.500.000.000
Harga Perolehan			14.000.000.000	40.500.000.000
Diskonto Obligasi			-	(466.607.006)
Premium Obligasi			71.246.250	84.288.448
Jumlah Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			14.071.246.250	40.117.681.442

Reksadana

Reksadana MNC Dana SBN	1.000.000.000	-
Harga Perolehan	1.000.000.000	-
Selisih Nilai Wajar Reksadana	(710.345)	-
Jumlah Reksadana	999.289.655	-

Jumlah Aset Keuangan

49.163.245.665	42.117.681.442
-----------------------	-----------------------

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang tersedia untuk dijual dan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

8. PROPERTI INVESTASI

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>Properti tanah dan bangunan</i>	2.472.000.000	2.445.000.000
	2.472.000.000	2.445.000.000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

9. ASET TETAP

Aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	<u>Saldo</u> <u>12/31/2018</u>	<u>Mutasi tahun 2019</u>		<u>Saldo</u> <u>12/31/2019</u>
		<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.897.465.327	55.274.000	-	1.952.739.327
Kendaraan	2.887.890.000	-	-	2.887.890.000
Gedung	7.120.521.054	134.029.500	-	7.254.550.554
Tanah	3.463.500.000	-	-	3.463.500.000
Jumlah	15.369.376.381	189.303.500	-	15.558.679.881
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.236.702.918)	(291.465.585)	-	(1.528.168.503)
Kendaraan	(1.369.192.875)	(275.946.001)	-	(1.645.138.876)
Gedung	(516.955.812)	(169.272.767)	-	(686.228.579)
Jumlah	(3.122.851.605)	(736.684.353)	-	(3.859.535.958)
Nilai buku	12.246.524.776			11.699.143.923

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 12/31/2017	Mutasi tahun 2018		Saldo 12/31/2018
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.780.868.171	116.597.156	-	1.897.465.327
Kendaraan	2.622.900.000	264.990.000	-	2.887.890.000
Gedung	7.120.517.250	3.804	-	7.120.521.054
Tanah	3.463.500.000	-	-	3.463.500.000
Jumlah	14.987.785.421	381.590.960	-	15.369.376.381
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(911.645.602)	(325.057.316)	-	(1.236.702.918)
Kendaraan	(1.125.338.750)	(243.854.125)	-	(1.369.192.875)
Gedung	(350.810.397)	(166.145.415)	-	(516.955.812)
Jumlah	(2.387.794.749)	(735.056.856)	-	(3.122.851.605)
Nilai buku	12.599.990.672			12.246.524.776

Aset tetap sudah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebongkaran, gempa bumi, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa semua aset tetap tersebut relatif aman. Aset tetap disusutkan setelah dikurangi dengan nilai residu dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

10. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	2019	2018
<i>Software</i>	693.422.255	692.242.755
Aset Lainnya	461.600.000	367.000.000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	1.155.022.255	1.059.242.755
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(540.163.068)	(411.615.986)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(266.054.162)	(213.104.162)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(806.217.230)	(624.720.148)
Nilai Buku Aset Lain-Lain	348.805.025	434.522.607
Aset Dalam Penyelesaian		
Aset Lain-Lain Dalam Proses	626.031.600	282.529.500
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian	626.031.600	282.529.500
Jumlah Aset Lain-Lain	974.836.625	717.052.107

Software adalah pengeluaran untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak komputer atau pengeluaran untuk membuat perangkat lunak komputer oleh pihak ketiga dikapitalisir dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan saldo pengeluaran untuk memperoleh pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. UTANG Re/Cogaranasi

Utang Re/Cogaranasi per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
<i>Best One Asia Reinsurance Broker</i> (BOARE)	3.579.824.307	3.257.883.898
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	992.464.307	31.729.429
Jumlah Utang Re/Cogaranasi	4.572.288.614	3.289.613.327

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker* (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	2019	2018
Beban Umum yang masih harus dibayar	539.063.160	347.157.680
Biaya Pegawai Yang Masih Harus di Bayar	125.489.067	602.958.425
Biaya Komisi Agen	233.848.835	306.350.827
Cadangan CSR	-	11.070.841
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	898.401.062	1.267.537.773

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, uang lembur karyawan dan biaya komisi agen bulan Desember 2019 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

13. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Penampungan IJP Bank Umum	2.252.388.939	1.605.030.644
Penampungan IJP Bank Syariah	789.208.723	546.874.894
Penampungan IJP Bank BPR	614.502.883	738.179.022
Jumlah Penampungan Sementara IJP	3.656.100.545	2.890.084.560
Penampungan Sementara Subrogasi	352.451.968	158.618.570
Jumlah Penampungan Sementara	4.008.552.513	3.048.703.129

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaranasi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

14. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Utang Kendaraan Jatuh Tempo Kurang dari 1 Tahun	-	44.833.325
Utang Pembayaran Premi BPJS	12.697.472	20.637.077
Utang Lancar Lain-lain	196.850	-
Jumlah Utang Lancar Lainnya	12.894.322	65.470.402

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari Utang kendaraan dan premi BPJS.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	2019	2018
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	27.944.235.566	20.646.574.054
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	4.129.127.225	3.296.617.490
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	32.073.362.791	23.943.191.544

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	2019	2018
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	143.234.391.853	65.543.062.772
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	8.060.692.545	5.365.941.050
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	151.295.084.398	70.909.003.822

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka akan diakui sebagai pendapatan IJP dan pendapatan IJK selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan dan Imbal Jasa Kafalah diterima dimuka adalah 4 (empat) tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), fee based income, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

16. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	2019	2018
Saldo Awal	3.192.039.354	3.457.809.341
Penambahan Cadangan Klaim	858.424.997	-
Pengurangan Cadangan Klaim	-	(265.769.987)
Jumlah Cadangan Klaim	4.050.464.351	3.192.039.354

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	2019	2018
Utang Kendaraan Jatuh Tempo Lebih dari 1 tahun	-	-
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.389.732.898	1.002.885.658
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	386.292.140	263.941.538
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.776.025.038	1.266.827.196

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	2019	2018
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.389.732.898	1.002.885.658
Nilai wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	1.389.732.898	1.002.885.658
Jumlah lain yang diakui	-	-
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1.389.732.898	1.002.885.658

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	2019	2018
Kewajiban awal periode	1.002.885.657	846.353.145
Beban yang diakui di laba/rugi	334.786.287	312.780.267
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	52.060.954	(156.247.754)
Penyesuaian atas koreksi	-	-
Pembayaran Manfaat	-	-
Kewajiban akhir periode	1.389.732.898	1.002.885.658

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	2019	2018
Biaya jasa kini	250.524.175	249.949.565
Biaya bunga	84.262.112	62.830.702
Biaya jasa lalu vested	-	-
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	334.786.287	312.780.267

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuarial

	2019	2018
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal periode akuntansi	-	-
(Keuntungan) kerugian aktuarial - kewajiban	52.060.954	(156.247.754)
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	52.060.954	(156.247.754)

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	2019	2018
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	52.060.954	(156.247.754)
Perubahan lainnya	-	-
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	52.060.954	(156.247.754)

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	2019	2018
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	-	-
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	52.060.954	(156.247.754)
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	52.060.954	(156.247.754)

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	2019	2018
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	386.292.140	263.941.538
Nilai wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	386.292.140	263.941.538
Jumlah lain yang diakui	-	-
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	386.292.140	263.941.538

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	2019	2018
Kewajiban awal periode	263.941.538	227.505.993
Beban yang diakui di laba/rugi	84.355.559	79.646.038
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	37.995.042	(43.210.493)
Kewajiban akhir periode	386.292.139	307.152.031

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	2019	2018
Biaya jasa kini	61.920.528	63.419.664
Biaya bunga	22.435.031	16.226.374
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	84.355.559	79.646.038

d. Beban yang Diakui di Laporan Komprehensif Lainnya

	2019	2018
Pengukuran kembali aset imbalan pasti neto	37.995.042	(43.210.493)
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan komprehensif lainnya	37.995.042	(43.210.493)

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2019 dan 2018 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Tingkat Diskonto :	8,0%	8,5%
Kenaikan Gaji per Tahun :	6%	6%
Tabel Mortalita :	100% TMI III	100% TMI III
Tingkat Cacat :	5% TMI III	5% TMI III
Usia Pensiun Normal :	58 tahun	58 tahun

18. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
PPh 4 ayat 2	103.593.388	85.841.537
PPh Pasal 21	251.694.221	188.318.566
PPh Pasal 23	28.285.399	1.200.809
Jumlah Utang Pajak	383.573.008	275.360.912

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2019 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2019	2018
Laba Sebelum Pajak	3.515.875.248	831.732.108
Perbedaan Temporer:		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(854.519.479)	(723.197.716)
Kenaikan Cadangan Klaim	858.424.997	(265.769.987)
Kenaikan Imbalan Purna Jabatan	-	-
Pembayaran Manfaat IPK	-	-
Beban Imbalan Pasca Kerja	419.141.846	558.893.962
Jumlah	423.047.364	(430.073.741)
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	701.938.413	672.166.902
Beban Perjalanan Dinas	804.605.817	556.896.594
Beban Diklat Karyawan	257.097.201	256.713.640
Pemeliharaan Kendaraan	112.289.676	220.838.751
Beban Representasi	320.123.554	231.954.683
Tunjangan Kesehatan	486.148.852	416.349.004
Tunjangan Baju	116.487.000	106.620.488
Denda Pajak	6.293.960	5.877.708
Beban Umum Lainnya	266.210.315	220.637.033
Rugi Reksadana yang belum terealisasi	710.345	-
Jumlah	3.071.905.133	2.688.054.803
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(10.804.553.741)	(10.217.983.392)
Pendapatan Obligasi	(3.243.534.592)	(3.025.877.290)
Pendapatan Jasa Giro	(79.011.330)	(115.717.934)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(732.192.327)	-
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.161.028.563	2.044.901.338
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	486.585.338	375.770.625
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	37.340.990	22.482.079
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	132.960.375	-
Jumlah	(12.041.376.724)	(10.916.424.574)
Jumlah koreksi fiskal	(8.546.424.227)	(8.658.443.512)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(5.030.548.979)	(7.826.711.404)
Rugi (dibulatkan)	(5.030.548.000)	(7.826.711.000)
 Kerugian Pajak Tahun 2014		(3.885.454.000)
Kerugian Pajak Tahun 2015	(2.599.512.000)	(2.599.512.000)
Kerugian Pajak Tahun 2016	(1.773.305.000)	(1.773.305.000)
Kerugian Pajak Tahun 2017	(8.520.565.000)	(8.520.565.000)
Kerugian Pajak Tahun 2018	(7.826.711.000)	-
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(25.750.641.000)	(24.605.547.000)

c. Beban Pajak Penghasilan

	2019	2018
Pajak Penghasilan		
Pajak Final	-	-
25% x Penghasilan Kena Pajak	-	-
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	-	-

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

	2019			
	1 Jan 2019	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	31 Des 2019
Selisih penyusutan aset tetap	(371.022.109)	-	(213.629.870)	(584.651.979)
Cadangan klaim	798.009.838	-	214.606.249	1.012.616.087
Beban Imbal Pasca Kerja	277.644.861	22.513.999	104.785.461	404.944.321
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.151.387.000	-	286.273.500	6.437.660.500
Jumlah	6.856.019.590	22.513.999	392.035.340	7.270.568.929

	2018			
	1 Jan 2018	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	31 Des 2018
Selisih penyusutan aset tetap	(190.222.680)	-	(180.799.429)	(371.022.109)
Cadangan klaim	864.452.335	-	(66.442.497)	798.009.838
Beban Imbal Pasca Kerja	216.045.247	(39.061.939)	100.661.552	277.644.861
Cadangan Purna Jabatan	-	-	-	-
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	5.502.948.500	-	648.438.500	6.151.387.000
Jumlah	6.393.223.402	(39.061.939)	501.858.126	6.856.019.590

19. EKUITAS

	2019	2018
Penyertaan Modal	153.200.000.000	153.200.000.000
Cadangan Umum	4.094.651.887	3.761.254.327
Saldo Laba	3.907.910.588	1.333.590.236
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	87.155.374	(66.000.000)
Keuntungan pengukuran kembali	(211.204.526)	(143.662.529)
Jumlah Ekuitas	161.078.513.323	158.085.182.034

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. EKUITAS (Lanjutan)

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 8.000 lembar saham atau sebesar Rp 8.000.000.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15.300	10.000.000	153.000.000.000	99,87%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,13%
Jumlah	15.320	20.000.000	153.200.000.000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 03 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris Rita Evryani, SH., para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp 1,333,590,235, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 05 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.kn., para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2017 sebesar Rp 4.105.753.606, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

20. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	47.732.911.078	41.301.947.325
Beban Akuisisi	(6.835.633.831)	(5.414.683.696)
Restitusi IJP	(1.773.299.834)	(1.434.279.301)
Management Fee	3.219.841.076	744.034.313
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	42.343.818.489	35.197.018.641

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaranasi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	9.281.100.493	8.895.981.486
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1.523.453.248	1.322.001.906
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	3.243.534.592	3.025.877.290
Pendapatan Amortisasi Diskonto	79.011.330	115.717.934
Pendapatan Sewa Properti	76.100.000	-
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Surat Berharga	732.192.327	-
Jumlah Pendapatan Investasi	14.935.391.990	13.359.578.616

22. BEBAN KLAIM

Beban klaim per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Beban Klaim	22.636.374.896	22.490.345.113
Pemulihan Cadangan Klaim	858.424.997	(265.769.987)
Beban Re/Cogaransi	14.268.883.642	11.580.809.268
Jumlah Beban Klaim	37.763.683.535	33.805.384.394

23. BEBAN USAHA

Beban usaha per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	2019	2018
Beban Operasional	2.001.361.567	1.580.905.049
Beban Sumber Daya Manusia	11.415.120.309	11.074.805.430
Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.422.310.413	2.846.274.500
Jumlah Beban Usaha	16.838.792.289	15.501.984.979

Rincian Beban Operasional

	2019	2018
Beban Promosi	701.938.413	672.166.902
Beban Perjalanan Dinas	804.605.817	556.896.594
Beban Kendaraan Dinas	327.058.417	308.320.883
Beban Penagihan Subrogasi	167.758.920	43.520.670
Jumlah Beban Operasional	2.001.361.567	1.580.905.049

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	2019	2018
Gaji dan Tunjangan Komisaris	499.000.000	483.000.000
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	84.000.000	84.000.000
Gaji dan Tunjangan Direksi	2.250.000.000	2.250.000.000
Gaji dan Tunjangan Karyawan	5.171.983.204	4.639.545.918
Beban Imbal Pasca Kerja	419.141.846	558.893.962
Beban PPH 21	1.218.392.433	1.129.154.480
Beban Purna Jabatan	553.500.000	553.500.000
Beban Insentif	862.438.267	998.079.159
Beban Pengembangan SDM	348.564.559	260.867.140
Tunjangan SDM Lainnya	8.100.000	117.764.771
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	11.415.120.309	11.074.805.430

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

23. BEBAN USAHA (Lanjutan)

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	2019	2018
Beban Administrasi	300.765.028	250.170.684
Beban Sewa	109.972.632	112.598.276
Beban Komunikasi & Energi	261.189.117	278.161.327
Beban Penyusutan & Amortisasi Aset	918.181.435	904.463.777
Beban Pemeliharaan & Asuransi Aset	555.588.528	454.217.534
Beban Pajak - Pajak	17.461.110	17.268.201
Beban Umum	1.259.152.563	829.394.701
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.422.310.413	2.846.274.500

24 PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	3.218.321.634	3.231.634.226
Jumlah Pendapatan Subrogasi	3.218.321.634	3.231.634.226

25 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	187.292.542	112.282.746
Pendapatan Lainnya	253.595.615	681.741.295
Rugi yang belum terealisasi	(710.345)	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	440.177.812	794.024.041
Beban Lain-lain		
- Beban Bukan Usaha Lainnya	(1.443.587)	-
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(2.161.028.563)	(2.044.901.338)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(486.585.338)	(375.770.625)
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	(132.960.375)	-
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(37.340.990)	(22.482.079)
Jumlah Beban Lain-lain	(2.819.358.853)	(2.443.154.042)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(2.379.181.041)	(1.649.130.001)

26 TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

27 INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2019 dan 2018

	2019	2018
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	4.646.908.540	3.895.521.252
Beban Akuisisi	(785.145.439)	(621.145.494)
Manajemen Fee	192.826.512	114.519.430
Restitusi IJP	(7.592.728)	(530.261)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	4.046.996.885	3.388.364.927
Beban Klaim		
Beban Klaim	(2.313.485.482)	(1.896.162.904)
Pemulihan Cadangan Klaim	(325.942.590)	209.487.813
Beban Re/Cogaransi	(1.130.190.940)	(1.606.593.872)
Jumlah Beban Klaim	(3.769.619.012)	(3.293.268.963)
Pendapatan Penjaminan Bersih	277.377.873	95.095.964
Pendapatan Investasi	2.004.656.186	1.728.727.457
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(260.063.865)	(178.728.638)
Beban Usaha	(973.337.591)	(998.741.168)
Laba Sebelum Pajak	1.048.632.603	646.353.615
Beban Pajak Kini	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	105.122.503	131.841.377
Laba Bersih Unit Syariah	1.153.755.106	778.194.992

28 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2018 direklasifikasi untuk menyesuaikan penyajian tahun 2019

29 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 06 April 2020